

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah suatu negara dalam merespon suatu kejadian atau masalah di negara lain. Ruang lingkup fenomena hubungan internasional ditanggapi oleh suatu negara dengan dua cara diplomasi yaitu bilateral dan multilateral. Fenomena atau kasus dalam hubungan internasional menjadi kewenangan pemerintah berkaitan dalam merespon masalah tersebut melalui perwakilannya di negara tempat kejadian masalah. Setiap negara memiliki kementerian yang memiliki wewenang untuk mengurus hubungan negaranya dengan pihak negara lain dan organisasi internasional. Salah satu kewenangan kementerian luar negeri adalah melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang berkembang dari berbagai segi lini ekonomi, politik, hukum dan budaya. Hal ini membuat masyarakat Indonesia untuk berusaha dan berjuang untuk meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing. Hal tersebut mendorong mereka untuk bersedia bekerja dimanapun untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu keluarga.

Namun tidak sedikit dari para pekerja tersebut mendapat kekerasan atau perlakuan kurang layak dari majikan. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih melindungi TKI yang bekerja di luar negeri karena undang-undang saja sebenarnya tidaklah menjamin perlindungan TKI karena perbedaan budaya serta hukum yang berlaku di Indonesia dan di negara tujuan TKI, Malaysia khususnya.

Lapangan kerja yang minim di dalam negeri, membuat minat warga Negara Indonesia yang masih menganggur untuk mendaftar kerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia pun akhirnya membuat kebijakan menarik tenaga kerja dari Indonesia. *Kedua*, kondisi ekonomi Negara Malaysia yang lebih baik dibanding Indonesia, membuat pengupahan yang ada jauh lebih tinggi dibanding jika bekerja di Indonesia, terlebih dalam sektor yang sangat dibutuhkan dan beresiko, seperti PRT. Pengupahan yang lebih tinggi ini menjadi daya tarik dan daya dorong bagi mayoritas warga yang ingin bekerja dan mendapatkan uang. *Ketiga*, kemudahan bahasa yang digunakan, yaitu Melayu membuat warga Indonesia tidak terlalu sulit memahami dan mempelajari bahasa yang digunakan, lain halnya dengan bekerja di Hong Kong, Taiwan, ataupun Arab Saudi. Selain itu faktor kedekatan geografis pun menjadikan Malaysia sebagai tujuan utama bagi para pencari kerja dari Indonesia.

Namun dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang sangat banyak sehingga permasalahan terhadap TKI ikut meningkat. Malaysia menjadi salah satu Negara tujuan pengiriman TKI dengan tingkat kompleksitas permasalahan rumit bagi para TKI di sektor informal karena banyaknya jumlah kasus penganiayaan, dalam artian masalah mulai muncul pada masa pra-penempatan seperti pungutan liar dari oknum yang berperan sebagai agency dan menjanjikan pemberangkatan tanpa harus antri, pemalsuan dokumen calon tenaga kerja oleh oknum tidak bertanggung jawab, kekerasan pada saat di penampungan agency, dan masih banyak lagi, dari permasalahan awal tersebut

tentu akan berdampak pada saat penempatan tenaga kerja, bahkan sampai nanti pada masa pasca penempatan Tenaga Kerja Indonesia sangat rawan terkena masalah. Peneliti memilih Johor Bahru, Malaysia menjadi lokasi penelitian karena Johor merupakan bagian dari Negara Malaysia yang juga memiliki jumlah TKI yang besar seperti halnya Kuala Lumpur ataupun di bagian Negara Malaysia lainnya.

Selain itu terdapat beberapa potret kasus kekerasan yang terjadi pada buruh migran perempuan Indonesia sektor informal yang bekerja di Johor Bahru, Malaysia. Sebagai contoh Sedikitnya 40 tenaga kerja wanita (TKW) yang berada di Johor Bahru, Malaysia, terancam tidak bisa berlebaran di kampung halaman mereka. Mereka harus menjalani proses hukum karena menjadi korban penganiayaan dan penipuan para majikannya. Para TKW ini kini terpaksa ditampung di shelter Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru untuk mendapatkan perlindungan dan pengarahan dari konsulat. Para TKW berusia antara 20 hingga 40 tahun ini nampak antusias mengikuti pengarahan staf KJRI di Johor Bahru. Mereka adalah bagian dari 40 TKW yang ditampung di shelter KJRI Johor Bahru karena tengah didera berbagai masalah. Sejumlah TKW mengaku kabur dan minta perlindungan di KJRI setelah dianiaya sang majikan. Seperti dialami aina, pembantu rumah tangga berusia 30 tahun asal Probolinggo, Jawa Timur. Dia mengaku nekat kabur dari rumah majikannya karena beberapa kali dianiaya. Saat kabur dan minta perlindungan di KJRI, gaji aina selama satu setengah tahun juga belum dibayar oleh majikan. Selain menjadi korban penganiayaan, sejumlah TKW ini merupakan korban penipuan yang dilakukan majikan. Upah sebagai pembantu rumah tangga yang seharusnya menjadi hak mereka, tidak dipenuhi oleh majikan. Padahal mereka telah bekerja antara satu tahun hingga lima tahun. lama, para TKW yang ditampung di shelter ini terancam tidak bisa berlebaran bersama keluarga. Serta lamanya proses hukum pengadilan di Malaysia.

Sebanyak 161 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia lewat Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjung pinang, Kepulauan Riau. Para TKI ini dipulangkan menggunakan kapal dari Pelabuhan Pasir Gudang Johor Bahru, Malaysia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia. Para TKI yang dideportasi itu pulang kembali ke Indonesia setelah selesai menjalani masa tahanan dengan alasan pelanggaran Keimigrasian.

Adapun 161 orang itu berasal dari Depot Tahanan Imigrasi Pekan Nanas Malaysia. Dari hasil keterangan yang diperoleh dari para TKI itu, alasan Imigrasi Malaysia melakukan penangkapan dan menahannya hingga dipulangkan kembali ke Indonesia karena para WNI didapati bekerja tanpa izin resmi, ilegal karena berpindah sponsor, tidak bisa menunjukkan paspor saat terkena razia, dan over stay.

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari terjun langsung ke lokasi dan berbagai sumber, diketahui bahwa mayoritas permasalahan TKI terjadi di wilayah Johor Bahru.

Uraian di atas menjadi hal yang menarik diteliti karena kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Dari keseluruhan total Tenaga Kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan lulusan SD dan SMP, Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia dengan tingkat pendidikan yang terbatas ini menyebabkan tingkat kekerasan yang tinggi menimpa para Tenaga Kerja Indonesia. Kondisi ini semakin bertambah buruk dengan sistem perlindungan yang tidak memadai dan banyaknya jumlah agen perekrutan ilegal yang tidak bisa dengan mudah dijangkau oleh penegak hukum.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini peran pemerintah Indonesia sangat penting dan harus dijalankan secara menyeluruh. Melalui peran KJRI dalam menerapkan mekanisme perlindungan TKI di Malaysia menjadi hal lain yang menarik untuk dianalisa karena dengan vitalnya peran KJRI dalam mengatasi permasalahan TKI di luar negeri, sangat menentukan tingkat efektifitas dari mekanisme perlindungan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru dalam menangani permasalahan TKI ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui peran KJRI Johor Bahru dalam menangani permasalahan TKI sebagai bentuk perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai studi politik global khususnya peran KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, serta menjadi bahan pengembangan dan pengkajian dalam upaya diplomasi Indonesia demi mencapai kepentingan nasional Indonesia, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan TKI.